

**PIIL PESENGGIRI:**  
**POLITIK IDENTITAS KOMUNITAS LAMPUNG**  
*PIIL PESENGGIRI, POLITICS OF IDENTITY IN LAMPUNGNESE COMMUNITY*

**Zainal Arifin**

Program Studi Antropologi, Universitas Andalas  
Limau Manis, Pauh, Kota Padang.  
e-mail: arifinzed@gmail.com

*Naskah Diterima: 13 Desember 2019*

*Naskah Direvisi: 2 Maret 2020*

*Naskah Disetujui : 18 April 2020*

DOI: 10.30959/patanjala.v12i1.591

**Abstrak**

*Provinsi Lampung adalah salah satu cerminan wilayah multikultural yang ada di Indonesia. Multikultural yang ada di wilayah Lampung tidak bisa dilepaskan dari terbukanya komunitasnya dalam menerima kehadiran etnis lain di wilayahnya, yang tertuang dalam nilai-nilai budaya piil pesenggiri yang mereka miliki. Akan tetapi, piil pesenggiri pula sering diklaim sebagai penyebab konflik yang sering melibatkan orang Lampung. Ini menunjukkan ada paradoks cara pandang dalam memahami piil pesenggiri sebagai identitas orang Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, yang ditujukan untuk membantah klaim bahwa konflik yang sering terjadi di wilayah Lampung, disebabkan karena menguatnya piil pesenggiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piil pesenggiri sebagai identitas, justru mampu menciptakan harmoni dengan etnis lain. Melalui kasus komunitas Lampung di Way Kanan, mekanisme politik pengorganisasian identitas (politik identitas) tersebut, komunitas Lampung justru mampu menguatkan identitas piil pesenggiri-nya, sekaligus mampu menciptakan harmoni di tengah masyarakatnya.*

**Kata kunci:** politik identitas, multikultural, piil pesenggiri, Lampung Pepadun, Way Kanan Lampung.

**Abstract**

*Lampung Province is a reflection of multicultural region in Indonesia. Multiculturalism in the region is related to the openness of the community in accepting the presence of other ethnic groups in the region. The principle of openness is contained in the values of the piil pesenggiri as a part of their culture. But on the other hand, the piil pesenggiri was also often claimed as a cause of conflict involving frequently Lampungnese. This situation illustrated the existence of paradoxes of perspective in understanding the piil pesenggiri as Lampung people's identity. The research employs a qualitative approach with interview and observation data collection techniques. The research purposes is to obtain findings to refute the claims of the piil pesenggiri as trigger of frequent conflict in Lampung. The results of the study demonstrates the facts contradicting the claims. The piil pesenggiri as identity actually was even able to create harmony with other ethnic groups. In the case of the Lampungnese community in Way Kanan, through the political mechanism of organizing identity (politics of identity), the Lampungnese community was able to strengthen the identity of the piil pesenggiri while at the same time being able to create harmony in the community.*

**Keywords:** political of identity, multicultural, piil pesenggiri, Lampung Pepadun, Way Kanan Lampung.

## A. PENDAHULUAN

Lampung dikenal sebagai wilayah multikultural, dimana potensi konflik terlihat tinggi. Ini dibuktikan dengan tingginya intensitas kekerasan yang terjadi di wilayah Lampung yang dicurigai melibatkan komunitas Lampung (Pranoto, 2018; Wibowo, 2018; Zulfa, 2014). Berbagai kajian menunjukkan bahwa kekerasan yang melibatkan orang Lampung di wilayah Lampung ini, lebih disebabkan karena kegagalan akulturasi di wilayah tersebut (Humaedi, 2014). Di sisi lain, kekerasan yang melibatkan orang Lampung ini juga diasumsikan karena masih kuatnya nilai-nilai *piil pesenggiri* yang melandasi kehidupan orang Lampung. Dalam beberapa literatur, *piil pesenggiri* sering diterjemahkan sebagai harga diri (*pride*),<sup>1</sup> yang dicurigai sebagai pemicu dan akar kekerasan yang terjadi di wilayah Lampung selama ini (Sinaga, 2014; Siswanto et al, 2014; Kurniawan, 2017).<sup>2</sup>

Memahami akar konflik melalui pembacaan terhadap *piil pesenggiri* sebagai dasar kehidupan orang Lampung, bukanlah hal yang salah. Akan tetapi menekankan bahwa *piil pesenggiri* sebagai sumber dan akar kekerasan yang dilakukan orang Lampung tidak selamanya benar. Banyak kajian menunjukkan bahwa *piil pesenggiri* pada prinsipnya adalah nilai-nilai luhur yang di dalamnya mengandung aspek dinamis dan terbuka dengan etnis lain (Yusuf, 2016; Irianto, 2011; Sinaga, 2014). Sifat budaya yang dinamis dan terbuka ini, akhirnya membuat orang

Lampung sangat mudah menerima dan berkompromi dengan orang luar, sehingga menjadikan wilayah Lampung menjadi salah satu wilayah yang sangat multikultural. Bahkan sifat terbuka ini membuat komunitas Lampung menjadi kelompok minoritas (Thomas, 2014) dan termarginalkan di wilayahnya sendiri (Hidayat et.al, 2017).<sup>3</sup>

Multikultural adalah sebuah konsep yang menekankan akan adanya keragaman budaya di suatu wilayah. Berbeda dengan konsep multikulturalisme yang bisa dipahami sebagai ideologi atau cara memandang akan adanya keanekaragaman relasi dan interaksi antarbudaya tersebut dalam wilayah yang sama (Irhandayaningsih, 2012; Miller, 1995). Artinya, multikultural lebih menekankan pada keberagaman budaya sebagai fakta sosial, yang menentukan pola hubungan antarindividu dan kelompok budaya secara berbeda. Oleh sebab itu, suatu kelompok budaya akan selalu memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok budaya lain, karena latar belakang budaya yang memang berbeda (Setyaningrum, 2003). Oleh sebab itu, multikultural lebih menekankan arti pentingnya perbedaan antarkelompok budaya dengan identitas khas yang mereka miliki masing-masing (Suparlan, 2002a). Berbeda halnya dengan multikulturalisme sebagai ideologi yang digunakan suatu kelompok budaya dalam memandang dan memposisikan kelompok budaya lain, sehingga melahirkan pola interaksi khas antarkomunitasnya (Ganap, 2012; Syaifuddin, 2006).

Salah satu wilayah Lampung yang menunjukkan sifat multikultural tersebut, adalah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yaitu salah satu kabupaten dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi

<sup>1</sup> Menerjemahkan *piil pesenggiri* sebagai harga diri (*pride*) akhirnya membuatnya lebih dipahami sebagai pemicu untuk selalu menang dan unggul dalam setiap persaingan. Kesalahan dalam menerjemahkan ini yang membuat *piil pesenggiri* akhirnya dipandang negatif. Lihat juga Mustika (2011).

<sup>2</sup> Pemberitaan terakhir terkait dengan kekerasan yang melibatkan orang Lampung bisa dilihat dalam kasus di wilayah Mesuji pada Juli 2019 yang lalu (Permana, 2019 Juli 18)

<sup>3</sup> Menurut Irianto (2011), jumlah etnis Lampung di Provinsi Lampung pada tahun 2010 diperkirakan hanya 11,92 %, sementara etnis Jawa mendominasi sampai 61,88 %, dan etnis lainnya sebesar 26,17 %. Lihat juga Thomas (2014).

Lampung dengan luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup> atau 13,33 % dari luas wilayah Provinsi Lampung secara keseluruhan. Pada awalnya, Kabupaten Way Kanan adalah bagian dari Kabupaten Lampung Utara, sebelum akhirnya menjadi kabupaten tersendiri pada tahun 1999. Kabupaten Way Kanan terdiri dari 14 kecamatan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 446.113 jiwa. (BPS Way Kanan, 2019). Terbentuknya Kabupaten Way Kanan, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah panjang dinamika komunitas Lampung yang ada di wilayah ini. Pada tahun 1957, saat pemerintah pusat ingin menggelontorkan program transmigrasi ke Provinsi Lampung bagian utara, terjadi banyak penolakan dari berbagai wilayah, tetapi justru komunitas Lampung yang ada di Way Kanan menerima program tersebut.

Cerminan multikultural masyarakat di Kabupaten Way Kanan terlihat dari komposisi penduduknya yang multi etnis. Walaupun komunitas Lampung tetap mayoritas, tetapi hanya sekitar 30 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Selebihnya komposisi penduduk justru berasal dari pendatang, seperti Semendo (25 %), Jawa (20 %), Ogan (10 %), Bali (5 %) dan Sunda (5 %), selebihnya adalah komunitas pendatang lain seperti Minangkabau, Batak, dan Melayu Sumatera Selatan lainnya (5 %). Walaupun *piil pesenggiri* tetap menjadi pegangan penting bagi komunitas Lampung Way Kanan dalam berkehidupan, tetapi justru kehidupan multikultural di wilayah ini, tetap berjalan harmonis.

Wacana tentang multikultural juga sering dikaitkan dengan persoalan berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya termuat berbagai suku bangsa yang beragam (*plural society*). Masyarakat plural adalah sebuah konsep yang menekankan pada perbedaan suku bangsa dan kesukubangsaan, dimana warganya dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana yang sakrif dan primordial, dengan sikap *chauvinisme* dan *etnocentrisme* budayanya. Akibatnya,

masyarakat plural, sangatlah rawan konflik, khususnya konflik antarsuku bangsa. Untuk itu, sangatlah diperlukan sebuah kebijakan dengan menjadikan masyarakat plural menjadi sebuah masyarakat yang multikultural (Suparlan, 2002b), sangatlah diperlukan ideologi bersama “atas nama bangsa dan negara” untuk menyatukan perbedaan dalam bingkai bersama (Wasino, 2013; Utomo, 2012). Pandangan ini bukan sesuatu yang salah, tetapi akhirnya cenderung mengabaikan akan arti pentingnya perbedaan identitas budaya setiap kelompok (Hefner, 2007; Parekh, 2001; May, 1999). Asumsinya, setiap budaya, sebenarnya memiliki cara khas tersendiri dalam melakukan penyesuaian (*cultural conformity*). Pola penyesuaian ini dilakukan agar setiap kelompok budaya selalu tetap *survive*, sehingga di balik nilai harmoni yang mereka miliki juga akan selalu terkandung nilai destruktif (Spradley, 1987; Arifin, 2018; 2017).

Berangkat dari pemikiran ini, maka politik identitas di masyarakat multikultural harus dipahami sebagai upaya untuk menuju kesetaraan antarbudaya yang berbeda (*principle of equality*), bukan sebagai upaya untuk mencari persamaan (*principle of similarity*). Pandangan ini penting, karena setiap budaya pada prinsipnya akan selalu berupaya untuk menunjukkan dan menguatkan identitas kelompoknya, dan selalu berupaya untuk meminta legitimasi akan keberadaan mereka dalam kelompok multikultur tersebut (Parekh, 2001). Secara sederhana, identitas bisa dipahami sebagai “*the feeling of belonging to a certain social or cultural group*” (Aristova, 2016), yang meliputi pengalaman, bakat, keterampilan, kepercayaan, nilai-nilai dan pengetahuan mereka (Altugan, 2015; Chen, 2017). Sebagai sebuah identitas, maka setiap budaya akan mendefinisikan dan membedakan diri dan kelompoknya dengan kelompok lainnya, dimana dasar pembentukan awalnya cenderung berbasis etnisitas (Maher, 1994; Emberling, 1997)

dan secara khusus berbasis keturunan (*descent-based attributes*) (Konti, 2007; Chandra, 2006).

Identitas ini bisa diwujudkan dalam bentuk atribut genetik (misalnya, warna kulit, jenis kelamin, jenis rambut, warna mata, tinggi, dan fitur fisik), bisa berbentuk warisan budaya dan sejarah (misalnya, nama, bahasa, tempat lahir, dan asal dari orang tua dan leluhur seseorang), atau dalam bentuk penanda warisan tersebut (misalnya, nama belakang atau tanda suku) (Chandra, 2006). Pada perkembangannya, identitas akhirnya juga terwujud dalam bentuk agama dan ritual keagamaan, seni, pakaian, makanan, bahkan pekerjaan, jenis kelamin dan perilaku sosial (Gupta, 2009).

Persoalannya, di wilayah yang sudah multikultural, tidak semua komunitas mampu menampilkan dan menguatkan identitas kolektifnya, sehingga diperlukan gerakan sosial untuk meujudkannya di hadapan komunitas lain. Gerakan sosial inilah yang kemudian dipahami sebagai politik identitas. Menurut Kalin dan Sambanis (2018), ini penting dilakukan karena identitas cenderung akan mempengaruhi hasrat individu untuk menguatkan martabat dan kehormatan dirinya, serta menjadi referensi sosial bagi perilakunya. Artinya politik identitas (*politics of identity*) bisa dipahami sebagai sebuah gerakan sosial yang mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas sebagai sumber daya dan sarana untuk menguatkan identitas diri setiap komunitas.<sup>4</sup>

Memahami identitas dan politik identitas Lampung dalam konteks multikultural tidak bisa dilepaskan dari *piil pesenggiri* sebagai filosofi berkehidupan

yang mereka terapkan. Hal ini disebabkan karena komunitas Lampung khususnya Lampung *pepadun* yang ada di Way Kanan, relatif masih kuat menerapkan *piil pesenggiri*-nya, sehingga seseorang belum bisa diterima dalam berbagai aktivitas adat yang mereka lakukan, apabila posisi dirinya masih dianggap sebagai orang luar (Yanti et.al, 2014). Artinya, seseorang baru bisa diterima dan ikut terlibat dalam berbagai aktivitas adat yang mereka lakukan apabila ia sudah “di-Lampungkan”. Proses “menjadi Lampung” ini bisa berdasarkan garis keturunan, tetapi juga bisa melalui adopsi (*angkon*), sehingga orang luar akan diposisikan “sebagai Lampung”.

Proses “menjadi Lampung” ini juga penting dalam mengukur kesetaraan status sosial seseorang, sehingga seseorang layak duduk bersama dengan orang Lampung apabila mereka memiliki status sosial yang setara. Oleh sebab itu, “menjadi Lampung” tidak saja bermakna memiliki garis keturunan Lampung, tetapi juga harus memiliki status sosial berdasarkan adat Lampung itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa identitas bagi komunitas Lampung adalah cara untuk menunjukkan akan persamaan hak dan posisi dalam komunitasnya, sehingga perbedaan dan persamaan hak dan posisi tersebut akan berimplikasi pada kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang.

Berangkat dari pemikiran di atas, keharmonisan masyarakat multikultural Way Kanan ini tidak terlepas dari politik identitas yang dijalankan komunitas Lampung dalam menguatkan identitas kolektifnya yaitu *piil pesenggiri*. Artinya, *piil pesenggiri* sebagai identitas budaya bagi komunitas Lampung di Way Kanan, tidak saja menjadi alat penting dalam menguatkan identitas ke-Lampung-an mereka, tetapi juga mampu menjadi alat negosiasi dalam menciptakan harmonisasi dalam masyarakatnya. Artikel ini mencoba menyoroti bagaimana politik identitas *piil pesenggiri* yang dimainkan komunitas Lampung di Way Kanan sehingga mampu

<sup>4</sup> Konsep politik identitas (*political of identity*) harus dibedakan dengan konsep identitas politik (*political identity*), karena identitas politik lebih dipahami sebagai konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam ikatan suatu komunitas politik (Endrizal dan Novi Hendri, 2018).

menciptakan masyarakat multikultural yang harmoni, dan implikasinya dalam proses berkehidupan di wilayah Lampung selama ini.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil kajian antropologis yang dilakukan penulis pada awal tahun 2019 yang lalu. Sebagai kajian antropologi, maka berbagai realitas dan data lapangan coba dipahami secara keseluruhan, sehingga ditemukan *cultural core* nya (Denzin & Yvonna, 1994). Adapun *cultural core* yang coba diungkap dalam penelitian ini adalah nilai-nilai budaya yang mendasari mengapa kehidupan komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan terlihat harmonis, sementara di beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung justru menunjukkan sebaliknya. Asumsinya, *cultural core* tersebut sudah lama tertanam dalam pola budaya komunitasnya, yang sangat mungkin sudah tidak disadari lagi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian ini dipilih dengan argumentasi bahwa nilai-nilai budaya yang coba dipahami bukan bertujuan mengkuantifikasi (*quantifying*) gejala yang ada, tetapi lebih mendalami makna yang ada di balik gejala tersebut (Creswell, 2014). Untuk itu, berbagai informasi di lapangan coba dikumpulkan dan didalami melalui teknik wawancara observasi. Melalui teknik ini, maka segala informasi terkait dengan kehidupan komunitas Lampung, coba ditelaah secara saksama, mendetail dan mendalam. Berbagai kategori ditelusuri dan dianalisis termasuk kemungkinan akan hubungan antarkategori yang ada, sehingga menjadi sebuah informasi yang terintegrasi satu sama lain.

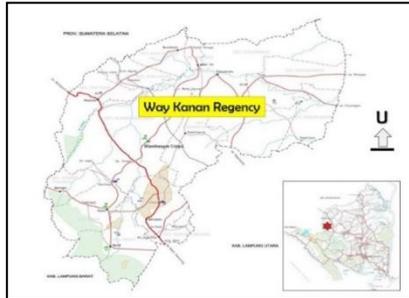
Berbagai informasi yang diberikan setiap anggota komunitas Lampung yang ada di Way Kanan ini, lebih dilihat sebagai individu yang telah mentransformasikan dirinya ke dalam suatu tahap *cultural code*, sehingga memunculkan individu sebagai

penjelmaan pengalaman kelompoknya. Melalui cara ini, maka pengetahuan yang mendalam tentang arti pentingnya identitas (*piil pesenggiri*) bagi komunitasnya, dan bagaimana politik identitas tersebut dilakukan diharapkan bisa ditemukan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang secara adat termasuk dalam kelompok adat *pepadun* yang relatif masih kental dalam menjalankan adatnya.<sup>5</sup> Secara adat, Komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan sudah menunjukkan keragaman tersendiri, dimana komunitasnya terkelompok dalam 5 *kebuayan* (*clans*) dengan 8 *marga* (teritorial). Sebagai sebuah komunitas adat, maka Lampung *pepadun* yang ada di Way Kanan, relatif masih kuat menerapkan adat, sehingga identitas ke-Lampung-an seseorang masih dianggap penting. Oleh sebab itu menurut Yanti, Hasyim, dan Nurmalisa (2014), keberadaan orang luar hanya akan diterima apabila mereka sudah “di-Lampung-kan”. Sebagai politik identitas, maka “menjadi Lampung” berarti menjadikan orang luar memiliki identitas yang relatif sama dengan orang Lampung lainnya. Artinya, menjadi Lampung berarti menempatkan *piil pesenggiri* sebagai pedoman dalam berkehidupan, sekaligus pedoman agar tetap harmonis dengan komunitas etnis lain yang ada di sekitarnya.

---

<sup>5</sup> Secara umum, Lampung bisa dibagi atas dua *ethnic group*, yaitu Lampung *seibatin* (pesisir) dan Lampung *pepadun* (pedalaman). Apabila Lampung *seibatin* lebih banyak berkembang dan tersebar di sepanjang pesisir Lampung, maka Lampung *pepadun* lebih banyak berkembang dan tersebar di daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung (Nurdin, 2019).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

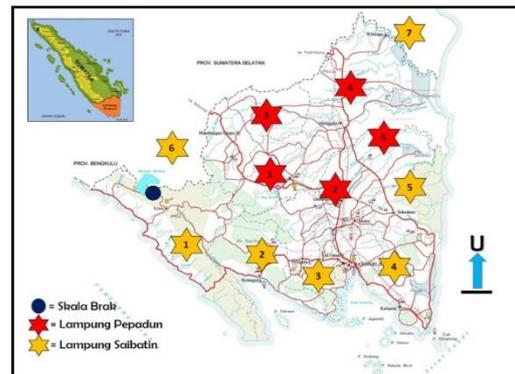
Sumber: diolah dari <http://loketpeta.pu.go.id>

## C. HASIL DAN BAHASAN

### 1. Lampung *Pepadun* Way Kanan

Secara adat, etnis Lampung terbagi atas 2 kelompok adat (*moiety*) yaitu Lampung *saibatin* dan Lampung *pepadun*.<sup>6</sup> Kelompok adat Lampung *saibatin* adalah komunitas Lampung yang berkembang di sepanjang pesisir pantai timur, selatan dan barat Lampung, sehingga kelompok adat Lampung ini juga sering disebut Lampung *peminggir* (pesisir). Sementara kelompok adat Lampung *pepadun* adalah komunitas Lampung yang berkembang di daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung (Yanti, 2014).<sup>7</sup> Adapun sebaran wilayah

komunitas Lampung *saibatin* dominan di daerah pinggiran pantai seperti di Kabupaten Lampung Barat, Tenggamas, Pesawaran, Lampung Selatan dan bagian barat daerah Kabupaten Lampung Timur. Sementara sebaran wilayah komunitas Lampung *pepadun*, dominan di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang dan bagian utara Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 2. Sebaran Wilayah Adat Lampung *Pepadun* dan Lampung *Saibatin*.

Sumber: Hasil olahan data lapangan, 2019.

Komunitas Lampung *pepadun* yang ada di Way Kanan, umumnya tersebar di bagian timur, yang menurut sejarah bermula dari sebuah daerah yang sekarang menjadi Kecamatan Negeri Besar. Bermula dari wilayah inilah kemudian komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan akhirnya tersebar ke wilayah barat dan tengah Kabupaten Way Kanan. Secara adat, komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan, terdiri dari 5 *kebuayan* yaitu Semenguk, Barasati, Bahuga, Baradatu dan Pemungka. Setiap *kebuayan* ini memiliki wilayah teritorial tersendiri yang disebut dengan *marga*, tetapi pada perkembangan kemudian, salah satu *kebuayan* (yaitu Pemungka) yang awalnya hanya 1 *marga*, akhirnya membelah diri menjadi 4 *marga* sehingga akhirnya 5 *kebuayan* ini terdiri dari 8 *marga*. Adapun 8 *marga* tersebut adalah; *marga* Semenguk, *marga* Barasati,

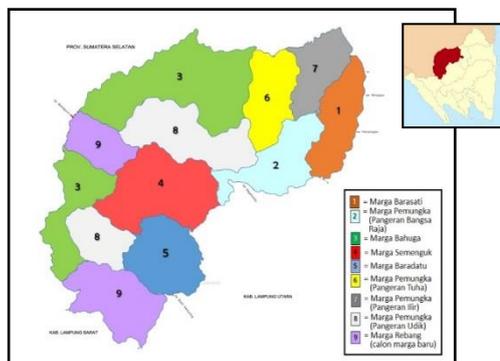
<sup>6</sup> *Saibatin* memiliki makna yaitu satu (*sai*) asal garis keturunan atau satu nenek moyang (*batin*). Sedangkan *Pepadun* adalah nama singgasana yang biasa dijadikan tempat duduk bagi seorang pimpinan, sehingga *pepadun* bisa juga dimaknai sebagai satu arah kebijakan (hasil wawancara lapangan)

<sup>7</sup> Perbedaan mendasar dari dua kelompok adat ini antara lain: (1) dari sisi bahasa, Lampung *saibatin* menggunakan bahasa dialek A, sedangkan Lampung *pepadun* menggunakan dialek O. (2) hiasan kepala pengantin perempuan (*singer*) Lampung *saibatin* mahkota memiliki tujuh lekuk dengan hiasan bunga pada bagian atas, sedangkan Lampung *pepadun* memiliki sembilan lekuk. (3) pakaian adat yang dikenakan Lampung *saibatin* cenderung berwarna merah, sedangkan Lampung *pepadun* cenderung berwarna putih. (4) pola kepemimpinan adat Lampung *saibatin* cenderung aristokratis seperti halnya kerajaan, sedangkan Lampung *pepadun* cenderung demokratis dimana

semua orang punya peluang menjadi pemimpin adat.

*marga* Bahuga, *marga* Baradatu, *marga* Pemungka Pengeran Tua, *marga* Pemungka Pengeran Udik, *marga* Pemungka Pengeran Hilir, dan *marga* Pemungka Pengeran Bangsa Raja.

Terjadinya pembelahan diri *marga* Pemungka menjadi 4 *marga*, hal yang biasa dalam adat Lampung *pepadun* di Way Kanan.<sup>8</sup> Ini tidak terlepas dari pola adatnya yang demokratis, yang memungkinkan suatu kelompok membelah diri dan membentuk *marga* baru. Akan tetapi proses pembelahan diri juga tidak bisa dilakukan semena-mena, karena harus terlebih dahulu melalui proses panjang mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Pada tingkat terendah, keinginan membelah diri tersebut harus mendapat persetujuan dari para pemimpin adat (*punyimbang*) yang ada dalam kelompok *kebuayan*-nya. Setelah mendapat persetujuan dari kelompok *kebuayan*-nya, maka tahap berikutnya adalah menyampaikan keinginan tersebut ke seluruh pimpinan adat *kebuayan* yang ada di Way Kanan sebagai keputusan pemimpin tingkat tinggi.



Gambar 3. Sebaran Wilayah *Marga* Lampung *Pepadun* di Way Kanan.

Sumber: Hasil olahan data lapangan, 2019.

<sup>8</sup> Seorang pemimpin adat (*punyimbang*) di Way Kanan menjelaskan bahwa pembelahan *marga* Pemungka ini terjadi jauh sebelum kemerdekaan (diperkirakan terjadi tahun 1930-an). Walaupun terjadi pembelahan *marga*, tetapi mereka tetap merasa sebagai satu *kebuayan* yang sama yaitu Pemungka.

Berangkat dari musyawarah tingkat tinggi ini, maka usulan tersebut akan dibawa setiap pimpinan *kebuayan* untuk dimusyawarahkan dalam kelompok *kebuayan*-nya masing-masing. Oleh masing-masing pimpinan *kebuayan*, maka usulan tersebut akan dibawa dalam rapat pimpinan tingkat *kebuayan* masing-masing, dengan meminta masukan seluruh pimpinan adat yang ada dalam *kebuayan*-nya. Barulah hasil musyawarah setiap *kebuayan* tersebut akan dibawa ke musyawarah pimpinan adat tingkat tinggi untuk diambil keputusan. Sebagai kelompok yang demokratis, maka setiap permasalahan yang terjadi dalam kelompok adat Lampung *pepadun* ini akan dimusyawarahkan secara bersama tergantung pada level atau tingkatan musyawarahnya.

Pola pengambilan keputusan yang demokratis ini pula, yang membuat adanya keinginan dari kelompok baru yang ada di beberapa kampung yang ada di Kecamatan Way Tuba, Rebang Tangkas, Kasui dan Banjit mencoba membentuk *marga* baru yang direncanakan akan diberi nama *marga* Rebang. Kelompok adat *marga* Rebang ini, awalnya adalah kumpulan dari beberapa kelompok *marga* yang ada di Way Kanan yang bermigrasi dan tersebar ke berbagai wilayah yang ada di kecamatan tersebut. Keinginan untuk membentuk *marga* baru tidak terlepas dari mulai mengendurnya ikatan dengan *marga* lama mereka akibat intervensi baru dari *marga* lainnya atau dari budaya lainnya. Usulan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan telah sampai ke tingkat pimpinan adat tertinggi Way Kanan, tetapi belum ada keputusan final akan keinginan tersebut, karena beberapa *kebuayan* dan *marga* lainnya yang ada di Way Kanan, masih menolak dengan alasan akan semakin melemahkan rasa kebersamaan kelompok dan adat Lampung *pepadun* Way Kanan secara keseluruhan.

Pola adatnya yang demokratis dan selalu membuka peluang akan aturan dan kelompok baru inilah, yang membuat

kelompok adat Lampung *pepadun* yang ada di Way Kanan terlihat sangat beragam. Setiap *kebuayan* dan *marga* memiliki aturan dan tata caranya sendiri, dan setiap *kebuayan* tetap menghormati akan perbedaan tersebut. Walaupun demikian, setiap *kebuayan* dan *marga* juga merasa tetap sebagai satu kesatuan, karena merasa diikat oleh asal usul (nenek moyang) yang sama, adat yang juga sama (*pepadun*), dan sejarah wilayah yang sama.<sup>9</sup> Keragaman tetapi tetap merasa sebagai satu kesatuan inilah yang kemudian dijadikan motto oleh pemerintahan daerah kabupaten Way Kanan, yaitu *ramik ragom*, ketika kabupaten ini dibentuk tahun 1999. Menurut salah seorang pemimpin adat (*punyimbang*), motto ini bermakna bahwa dengan keragaman kelompok adat itulah maka keramaian (*ramik*) wilayah bisa diwujudkan. Ramai (*ramik*) di sini tidak saja ditunjukkan dengan tersebarnya orang Lampung Way Kanan di berbagai wilayah, tetapi juga ramai karena tradisi yang dikembangkan juga beragam.

Pola adat yang demokratis ini pula yang membuat komunitas Way Kanan juga sangat terbuka dalam menerima kehadiran etnis lainnya di wilayahnya. Jauh sebelum penerimaan komunitas Lampung Way Kanan terhadap program transmigrasi, wilayah ini sudah banyak dijadikan wilayah migran oleh komunitas dari Sumatera Selatan seperti Semende dan Ogan.<sup>10</sup> Bahkan pada zaman Belanda pun, wilayah Way Kanan sudah mulai kedatangan kelompok migran dari etnis

lain (khususnya Jawa) saat pembuatan jalan raya dilakukan. Ini menunjukkan bahwa penerimaan komunitas Lampung Way Kanan terhadap etnis lain, sudah lama dilakukan, walaupun pembuatan jalan raya tersebut terkait dengan kepentingan politik tanam paksa penjajah Belanda. Ini dibuktikan dengan penerimaan komunitas Lampung Way Kanan terhadap pekerja buruh (tanam paksa) dari Jawa ini, yang tidak ingin kembali ke kampung halamannya, dan lebih memutuskan untuk menetap di Way Kanan, dengan membuat kantong-kantong pemukiman di sepanjang jalan raya Lintas Sumatera tersebut. Pada tahun 1957, saat program transmigrasi direncanakan ke wilayah Way Kanan (waktu itu masih masuk dalam Kabupaten Lampung Utara), komunitas Way Kanan juga menerima program tersebut, sementara komunitas lain justru menolaknya.

Ini menunjukkan bahwa komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan adalah komunitas yang sangat terbuka dengan kehadiran orang luar (non-Lampung). Secara adat, keterbukaan ini memang sudah tertuang dalam nilai-nilai budaya yaitu *sakai sambayan*, yang bermakna untuk selalu tolong menolong antarsesama. Nilai budaya ini mengandung filosofi bahwa seorang Lampung harus selalu menolong orang lain (*sakai*), sehingga orang lain juga akan menolong kita bila ada dalam kesusahan (*sambayan*). Inilah yang membuat wilayah Way Kanan menjadi sangat beragam etnis, dimana komunitas migran ini tidak saja tersebar di berbagai perkampungan Lampung, tetapi bahkan juga membuat kantong-kantong pemukiman tersendiri. Walaupun keberadaan kelompok migran ini cenderung membawa adat dan nilai budayanya sendiri, tetapi keharmonisan antaretnis tetap terjaga dengan baik.

Bagi komunitas Lampung di Way Kanan, pola merangkul semua perbedaan ini sebenarnya sudah diamanahkan dalam budaya mereka. Variasi kelompok adat (*kebuayan* dan *marga*) yang mereka miliki,

<sup>9</sup> Sejarah asal usul komunitas Lampung Way Kanan bermula dari sebuah kampung yang bernama Negeri Besar (sekarang menjadi ibukota Kecamatan Negeri Besar), yang kemudian berkembang dan tersebar ke berbagai wilayah di Kabupaten Way Kanan (Renaldy, n. d.). Sejarah ini juga diyakini oleh komunitas Lampung *pepadun* yang ada di Way Kanan (hasil wawancara)

<sup>10</sup> Kasus di Kabupaten Way Kanan, komunitas Ogan banyak terkonsentrasi di Kecamatan Kasui, sementara komunitas Semende banyak terkonsentrasi di Kecamatan Banjit.

sudah menunjukkan arti penting dari keragaman dan perbedaan tersebut. Tetapi budaya juga yang mengajarkan mereka untuk selalu menjaga martabat dan kehormatan diri melalui sikap untuk saling menghormati dalam sebuah kesatuan. Oleh sebab itu, *ramik ragom* akhirnya tidak saja menjadikan wilayah Way Kanan menjadi wilayah multikultural dimana keragaman etnis bercampur menjadi sebuah kesatuan dalam wilayah yang sama. Akan tetapi, *ramik ragom* juga menjadikan wilayah Way Kanan sebagai arena budaya yang mampu mempertemukan berbagai nilai budaya yang beragam dalam sebuah misi bersama yaitu berbeda tetapi tetap satu.

## 2. Piil Pesenggiri: Kehormatan Diri Sebagai Identitas

*Piil pesenggiri* adalah filosofis yang menjadi dasar kehidupan setiap orang Lampung. Beberapa literatur Indonesia menerjemahkan *piil pesenggiri* sebagai harga diri (*pride*). Memaknai *piil pesenggiri* sebagai harga diri (*pride*) akhirnya melahirkan tuduhan bahwa *piil pesenggiri* adalah yang menjadi penyebab konflik dan kekerasan yang dicurigai melibatkan orang Lampung selama ini (Sinaga, 2012; Siswanto et.al, 2014; Kurniawan, 2017).<sup>11</sup> Tuduhan ini, juga didukung oleh pandangan umum dan pemberitaan di media massa, bahwa orang (*ulun*) Lampung cenderung memiliki watak keras sehingga suka melakukan kekerasan. Tuduhan ini berangkat dari data yang menunjukkan semakin tingginya intensitas kekerasan yang terjadi di wilayah Lampung yang melibatkan komunitas Lampung (Pranoto, 2018; Wibowo, 2018, Zulfa, 2014). Padangan ini tidak selamanya benar, karena berbagai kajian juga menunjukkan bahwa kekerasan yang

melibatkan orang Lampung di wilayah Lampung ini, bukan karena *piil pesenggiri* tetapi lebih disebabkan karena kegagalan akulturasi di wilayah tersebut (Humaedi, 2014). Artinya, akulturasi sebagai proses sosial dimana unsur budaya luar lambat laun diterima dan dijadikan milik budayanya (Koentjaraningrat, 1994), telah gagal terjadi di wilayah Lampung, lebih dikarenakan ketiadaan ruang bersama sebagai media dalam menyerap dan menyatukan karakter budaya masing-masing, baik dalam arti imajiner dan fisik, khususnya antara suku Bali dengan suku Lampung (Humeaedi, 2014).

Hasil kajian menunjukkan bahwa *piil pesenggiri* pada prinsipnya mengandung nilai-nilai luhur yang dalam aplikasinya bersifat dinamis dan sangat terbuka dengan etnis lain (Yusuf, 2016; Irianto, 2011; Sinaga, 2014). Sifat budaya yang dinamis dan terbuka inilah yang membuat orang Lampung sangat mudah menerima dan berkompromi dengan orang luar, sehingga menjadikan wilayah Lampung menjadi salah satu wilayah yang sangat multikultural. Bahkan sifat terbuka ini membuat komunitas Lampung menjadi kelompok minoritas (Thomas, 2014) dan termarginalkan di wilayahnya sendiri (Hidayat et al, 2017).<sup>12</sup> Bagi komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan, *piil pesenggiri* sebenarnya adalah tekad atau keinginan, keharusan dari dalam diri, semangat untuk mencapai sesuatu di tengah kemampuan yang tidak mendukung. Menurut salah satu *punyimbang*, *piil pesenggiri* mengandung unsur paksaan atau semangat hidup dari dalam diri, sehingga *piil pesenggiri* juga bisa dimaknai sebagai “iman” yang tertanam dalam diri seseorang yang mengendalikan diri bagaimana berpikir

<sup>11</sup> Seorang *punyimbang* di Baradatu, Way Kanan, lebih suka memandang *piil pesenggiri* bukan sebagai harga diri (*pride*), tetapi lebih sebagai martabat dan kehormatan (*dignity and honor*), yang memang seharusnya dipertahankan.

<sup>12</sup> Menurut Irianto (2011), jumlah etnis Lampung di Provinsi Lampung pada tahun 2010 diperkirakan hanya 11,92 %, sementara etnis Jawa mendominasi sampai 61,88 %, dan etnis lainnya sebesar 26,17 %. Lihat juga Thomas (2014).

dan bertindak seharusnya menurut tata aturan yang sudah ditentukan (bukan asal bertindak).

Berangkat dari pemikiran ini, maka *piil pesenggiri* bagi komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan, sebenarnya adalah nilai-nilai yang menempatkan akan arti pentingnya martabat dan kehormatan diri (*dignity and honor*). Sebagai martabat dan kehormatan diri, maka *piil pesenggiri* bukanlah nilai yang membuat seorang Lampung “asal menang” tetapi nilai budaya yang mengharuskan orang Lampung “memenangkan” martabat dan kehormatan dirinya agar setara dengan komunitas lainnya. Konsepsi *piil pesenggiri* yang demikian, menunjukkan bahwa *piil pesenggiri* sebenarnya ada dan melekat pada setiap etnis manapun, tetapi dengan nama dan penjabaran yang relatif berbeda.<sup>13</sup> Artinya, *piil pesenggiri* sebenarnya adalah sesuatu yang ada pada setiap individu manusia tanpa terkecuali, hal-hal yang tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan dalam menjalankan kehidupan. Seperti semangat hidup tapi tidak merusak orang lain, identitas diri, iman, atau semangat untuk mengubah nasib agar menjadi lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya.

Ini menunjukkan bahwa, *piil pesenggiri* menjadi landasan bagi setiap orang untuk maju dan berkembang, tapi *piil pesenggiri* pula yang membuat seseorang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. *Piil pesenggiri* pula yang membuat seseorang menjadi juara tapi tidak mematikan yang kalah. Pemahaman ini menempatkan *piil pesenggiri* bukan bersifat individual, tetapi milik sosial yang akan mempengaruhi dinamika kelompoknya. Artinya, *piil*

*pesenggiri* akan teraplikasikan dalam bentuk proses penyesuaian diri, baik dengan sesama anggota komunitasnya sendiri, maupun dengan komunitas yang berbeda etnis. Implikasinya, jika seseorang direndahkan dan dianiaya, maka solidaritas akan menguat karena *piil pesenggiri* menekankan nilai kesetaraan, sehingga secara komunal akan melahirkan solidaritas sosial. Dengan kata lain, solidaritas sosial yang muncul bukan tidak selalu karena mereka satu etnik, satu agama, atau satu kelompok yang sama, tetapi karena mereka satu ideologis yaitu sama-sama memiliki *piil pesenggiri*.

Seorang *punyimbang marga* mencontohkan bagaimana aplikasi *piil pesenggiri* tersebut dalam kehidupan. Menurut beliau, setiap orang memiliki cita-cita dan harapan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, tetapi kalau seseorang tidak memiliki *piil pesenggiri*, maka segala rintangan yang dihadapi tidak akan bisa ia lalui dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, persoalan yang dihadapinya setiap hari akan sangat beragam dan tidak selalu sesuai dengan harapannya. Bila seorang pemimpin tidak memiliki *piil pesenggiri*, maka masalah yang tidak sesuai akan membuatnya menjadi emosional dan mudah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Sebaliknya bila ia memiliki *piil pesenggiri*, maka berbagai persoalan bisa ia atasi dengan tata cara yang sesuai dengan dirinya dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Seorang kepala kampung yang memiliki *piil pesenggiri*, maka ia akan menjadi kepala kampung yang arif dan bijaksana, bukan menjadi kepala *kampang*.<sup>14</sup>

Mengikuti pandangan *punyimbang* di atas, maka *piil pesenggiri* sebenarnya adalah sebuah kepekaan sosial yang dijunjung tinggi oleh orang Lampung, sehingga akan merasa terlecut *piil pesenggirinya* bila melihat ada persoalan

<sup>13</sup> Menurut seorang *punyimbang marga* di Way Kanan, *piil pesenggiri* juga akan ditemui di komunitas lain. Di Bugis, ia akan disebut dengan istilah *siri*, begitu juga dengan orang Minangkabau akan menyebutnya dengan istilah *beradaik*, dan bagi orang Melayu disebut *malu*.

<sup>14</sup> *Kampang* adalah kata umpatan orang Lampung yang sering diucapkan untuk mengungkapkan kemarahan dan kekesalan.

yang dirasa tidak sesuai dengan norma kehidupan seharusnya. Oleh sebab itu, seorang yang merasa dirinya Islam, maka *piil pesenggirinya* akan muncul apabila agamanya dihina. Apabila orang Islam dipaksa makan babi, walaupun dia tidak pernah menjalankan ibadah sholat, pemabuk, dan penjudi. dan jarang melakukan ibadah, tetapi kalau agamanya dihina, maka *piil pesenggirinya* akan keluar. Seseorang yang memiliki *piil pesenggiri*, maka ia berani berkorban dan mengorbankan diri demi menegakkan kebenaran tersebut, walaupun nyawanya menjadi taruhan. Oleh sebab itu, kalau sudah menyangkut *piil pesenggiri* yang menjadi akar persoalan, maka aparat keamanan, dan tokoh agama sekalipun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan hanya bisa diselesaikan secara adat, yaitu memperbaiki *piil pesenggiri* yang sudah dilanggar tersebut.

Cara pandang yang hampir sama juga diungkapkan oleh seorang *punyimbang tiyuh*. Menurut beliau, *piil pesenggiri* itu adalah semangat, tekad, kata hati dan kewajiban, yang dibalut oleh sebuah martabat dan kehormatan dirinya sebagai seorang yang menyandang *julok adok* tertentu. Sebagai *punyimbang tiyuh*, maka *piil pesenggirinya* adalah semangat untuk menjalankan dan menegakkan kebenaran sesuai dengan *julok adok* (gelar dan jabatan) yang disandangnya. Begitu juga sebagai seorang petani, maka *piil pesenggirinya* berupa semangat menegakkan kebenaran sesuai dengan *julok adoknya* sebagai petani. Oleh sebab itu, bagi seorang *punyimbang marga*, jika ada orang yang menyakiti atau merendahkan rakyat di kampungnya, maka *piil pesenggirinya* sebagai *punyimbang marga* akan muncul. Begitu juga bila ada yang menghina petani, maka *piil pesenggiri* petani akan muncul. Bila hal ini terjadi, maka permintaan maaf karena telah melakukan kesalahan belumlah mampu menyelesaikan persoalan. Persoalan bisa selesai bila permintaan maaf tersebut

diiringi dengan rasa dan ketulusan dalam hati, karena *piil pesenggiri* ada dalam hati dan perasaan setiap orang.

*Piil pesenggiri*, walaupun memiliki makna yang luas, tetapi intinya adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa seseorang dalam bentuk martabat, kehormatan diri, rasa malu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan posisi dan kedudukan (*julok adok*) dirinya. Oleh sebab itu, rasa tersinggung seorang petani akan berbeda dengan rasa tersinggung seorang pedagang, karena *piil pesenggiri* nya berbeda. Tetapi *piil pesenggiri* juga bisa bersifat umum dan dimiliki oleh semua orang, karena sama-sama sebagai Lampung, karena sama-sama sebagai Islam, karena sama-sama sebagai orang Way Kanan. Oleh sebab itu, *piil pesenggiri*-lah yang justru membuat seseorang Lampung akhirnya mampu bekerja keras dan melahirkan semangat untuk mencapai cita-cita dan keinginan seseorang. Artinya, *piil pesenggiri* telah mengendalikan seseorang agar mampu “seperti orang lain”, agar mampu setara dengan orang lain, dan tidak direndahkan orang lain karena dianggap tidak memiliki apa-apa. *Piil pesenggiri* akhirnya menjadi jiwa yang memotivasi seseorang agar selalu berhasil, selalu mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa setara dengan orang lain. Perujudannya tidak selalu dalam bentuk harta benda atau jabatan, tetapi berujud dalam bentuk pengakuan orang lain bahwa dirinya juga bermartabat dan memiliki kehormatan diri.

### **3. Angkon Muwakhi: Menyatukan Perbedaan dan Keragaman**

*Angkon muwakhi* berasal dari kata *angkon* yang berarti “mengangkat atau mengadopsi” dan *muwakhi* yang berarti “persaudaraan”.<sup>15</sup> Jadi *angkon muwakhi*

<sup>15</sup>Di beberapa kelompok komunitas Lampung lainnya, kata *muwakhi* juga sering disebut dengan kata *mewarei* atau *muakhi*, tetapi

bisa diartikan sebagai mengangkat orang lain yang ada di luar struktur keluarganya untuk menjadi saudaranya (Nurdin, 2009). Melalui ikatan persaudaraan ini akhirnya seseorang yang telah diangkat menjadi saudara bisa diterima menjadi bagian dari keluarga dan kelompok sosialnya. Bagi orang Lampung, hal ini penting karena seseorang hanya bisa diterima dan ikut terlibat dalam berbagai aktivitas adat yang mereka lakukan apabila ia sudah “menjadi Lampung”. “Menjadi Lampung”, bisa terjadi karena berdasarkan garis keturunan, atau karena diangkat atau diadopsi dan diposisikan “sebagai Lampung”. Bagi orang luar dan etnis lain, satu-satunya cara untuk “menjadi Lampung” adalah diadopsi oleh orang Lampung melalui *angkon muwakhi*.

Sebagai komunitas yang terbuka, sebenarnya identitas Lampung cenderung dibentuk sebagai hasil persilangan dan responnya terhadap komunitas dan budaya luar tersebut. Adanya nilai budaya *angkon muwakhi* secara jelas menunjukkan bagaimana respon komunitas Lampung dalam menghadapi budaya dan komunitas luar. Melalui *angkon muwakhi*, orang yang berasal dari etnis lain kemudian dimasukkan sebagai bagian dari identitas ke-Lampung-an tersebut. Ini menunjukkan bagaimana politik identitas sebagai kategori sosial dibentuk dan direkonstruksi agar memenuhi syarat untuk menjadi anggota suatu kelompok. Melalui politik identitas ini, maka identitas ke-Lampung-an seseorang tidak lagi hanya dilekatkan pada seseorang berbasis keturunan, tetapi juga bisa dilekatkan pada orang lain berbasis persamaan identitas (status sosial).

Penyamaan identitas yang diharapkan inilah, yang mendasari akan arti pentingnya ikatan persaudaraan yang ditunjukkan dalam *angkon muwakhi*. Sebagai komunitas Lampung yang masih mementingkan akan identitas ke-

Lampung-an seseorang, maka penyamaan persepsi akan identitas tidak mungkin bisa diwujudkan apabila keragaman tetap berbasis pada perbedaan. Oleh sebab itu perbedaan persepsi harus disatukan dalam sebuah identitas yang sama, yaitu “sama-sama sebagai Lampung”. Cara menyamakan perbedaan menjadi sebuah kesatuan tersebut adalah memposisikan seseorang sebagai saudara (*muwakhi*) bagi dirinya. Dalam *angkon muwakhi*, identitas asal seseorang yang diadopsi sebagai saudara tetap diakui, tetapi identitas “sebagai Lampung” harus diutamakan sebagai basis dirinya ketika beraktivitas dalam adat Lampung. Seorang pendatang yang berasal dari Padang menjelaskan pengalamannya sebagai saudara angkat (*muwakhi*) dari orang Lampung,

“waktu saya diangkat jadi saudara (*angkon muwakhi*)

oleh orang Lampung, saya ditanya apa gelar saya kalau di Padang. Saya jawab gelar saya adalah Sutan Pemenan, dan saya jelaskan bahwa gelar ini bukan gelar bangsawan, tapi hanya gelar orang biasa yang membuktikan bahwa saya sudah berkeluarga.<sup>16</sup> Saudara Lampung saya justru tetap mempertahankan gelar Padang saya dan hanya menambah Negeri sebagai ciri khas Lampung saya, sehingga gelar Lampung saya

<sup>16</sup>Di masyarakat Minangkabau, gelar digunakan sebagai panggilan ketika seseorang dianggap sudah dewasa. Ada 3 jenis gelar, yaitu (1) gelar keluarga, yang diberikan kepada semua laki-laki Minang ketika sudah berkeluarga; (2) gelar yang diberikan hanya kepada laki-laki tertentu dari garis keturunannya sebagai gelar warisan dari kaumnya (*gala sako*); (3) gelar kehormatan, yang diberikan kepada seseorang karena dianggap memiliki jasa terhadap diri atau kelompok yang memberi gelar. Lihat Arifin (2018).

pada hakikatnya bermakna sama yaitu bersaudara atau persaudaraan (Nurdin, 2009)

sekarang adalah Sutan Pamenan Negeri.”<sup>17</sup>

Pentingnya *angkon muwakhi* ini tidak saja membawa implikasi pada orang Lampung sebagai aktor yang mengangkat seseorang sebagai saudara (*angkon*). Tetapi juga berimplikasi pada seseorang yang berasal dari etnis lain yang diangkat sebagai saudara (*muwakhi*). Pada sisi orang Lampung sebagai *angkon*, maka ikatan persaudaraan ini membawa implikasi terciptanya kemeriahan dan kemegahan sebagai basis dalam menguatkan *piil pesenggirinya*. Pada sisi etnis luar sebagai *muwakhi*, maka adanya ikatan persaudaraan ini membuat mereka merasa terlindungi karena sudah dianggap “sebagai Lampung”. Oleh sebab itu, ketika seseorang yang sudah dianggap saudara (*muwakhi*), dirinya tidak saja akan mendapat perlindungan dari orang yang mengadopsinya (*angkon*), tetapi yang terpenting adalah mendapat perlindungan dan pengayoman dari pemimpin adat dalam kelompoknya (*punyimbang*).

Penyamaan identitas ini pula, yang membuat *angkon muwakhi* juga menjadi sarana penting bagi komunitas Lampung untuk mensejajarkan status sosial yang ada di antara mereka. Oleh sebab itu “menjadi Lampung” juga bermakna bahwa seseorang bisa dirangkul dan duduk bersama apabila ada dalam posisi status sosial yang sama. Hal ini penting, karena bagi komunitas Lampung, seorang pemimpin adat (*puyimbang*) adalah tokoh yang harus dijunjung tinggi, sehingga posisinya dianggap tidak setara dengan masyarakat awam yang bukan *punyimbang*. Ketidaksetaraan inilah yang membuat tidak semua orang bisa duduk bersama dengan *punyimbang*, dan hanya orang yang memiliki status sosial yang

dianggap sama dan setara yang bisa duduk bersama dan bermusyawarah dengan dirinya. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan status sosial juga menjadi penting, karena kesetaraan bermakna sebagai kesamaan identitas, pola pikir dan perilaku. Dalam konteks ini, kesetaraan hanya bisa dilakukan dengan cara memindahkan status sosial orang lain ke dalam status sosial yang dianggap setara.

Pentingnya akan kesetaraan status sosial ini pula yang membuat Bupati Way Kanan yang menjabat sekarang (Raden Adipati Surya) harus melakukan *angkon muwakhi* dengan kelompok *punyimbang* Blambangan Umpu sebelumnya. Hal ini dilakukan karena Bupati Way Kanan, bukanlah dari kelompok *punyimbang*, sehingga dianggap tidak pantas apabila duduk bersama dan bermusyawarah dengan kelompok *punyimbang*. Sementara sebagai bupati, maka secara administratif dirinya berhak dalam memimpin dan duduk bersama dengan kelompok adat tersebut. Oleh sebab itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memindahkan status sosialnya dari orang biasa (Adipati Surya) menjadi *punyimbang* (Raden Adipati Surya). Pemandahan status sosial pemimpin negara menjadi pemimpin adat ini, tidak saja membawa implikasi pada pengakuan pejabat negara sebagai bagian dari kelompok adat di wilayahnya. Tetapi juga membawa implikasi pada kelompok adat yang mengharapkan pemimpin negara harus berlaku sebagai pengayom bagi rakyatnya sesuai dengan martabat dan kehormatan dari gelar yang disandangnya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Menurut informan, penambahan kata Negeri oleh saudara Lampung-nya karena kata tersebut cerminan bahwa saya sudah “menjadi Lampung”, dan kebetulan juga informan tinggal di kampung bernama Cahaya Negeri.

<sup>18</sup> Dalam filosofi *piil pesenggiri*, martabat dan kehormatan yang dipertaruhkan melalui gelar adat ini dikenal dengan sebutan *juluk adok*, dimana seseorang dituntut untuk selalu menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan gelar yang disandangnya. Oleh sebab itu, gelar adat dalam konsep *juluk adok* ini tidak selalu berarti gelar kebangsawanan, tetapi bisa juga bermakna sebagai status sosial yang dihormati. Lihat juga Kurniawan (2017).

*Angkon muwakhi* sebagai ikatan persaudaraan yang dilakukan dalam kasus pejabat negara ini, tidaklah dilakukan kepada individu pejabatnya, tetapi lebih dilekatkan pada status sosialnya sebagai pejabat negara. Oleh sebab itu, ketika seorang pejabat negara tersebut selesai menjalankan tugasnya, maka ikatan persaudaraan tersebut otomatis juga terputus. Artinya pemindahan status sosial melalui *angkon muwakhi* ini lebih bersifat sementara, dan akan dilakukan kembali apabila pejabat negara baru muncul. Ini berbeda dengan *angkon muwakhi* yang diberikan pada individu yang berasal dari etnis lain, dimana ikatan persaudaraan yang dibangun bersifat permanen, dan juga akan berdampak pada keturunan orang yang dianggap saudara tersebut.

Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang diberlakukan komunitas Lampung di Way Kanan bukanlah nilai-nilai yang kaku. Proses rekonstruksi akan selalu dilakukan sebagai upaya agar tetap menjaga otoritas kepemimpinan adat tersebut. Melalui *angkon muwakhi*, akhirnya keberadaan pejabat negara sebagai pemilik otoritas negara disetarakan dengan *punyimbang* sebagai pemimpin dan pemilik wilayah adat. Melalui rekonstruksi ini maka keabsahan otoritas pemimpin adat (*punyimbang*) dalam menegakkan aturan dan norma budaya Lampung tetap bertahan, di tengah kekuasaan negara yang terus menguat. Oleh sebab itu, menyamakan identitas melalui status sosial dengan cara me-Lampung-kan status sosial pejabat negara, menjadi strategi jitu dalam menekan perbedaan tersebut.

#### **D. PENUTUP**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan negatif tentang komunitas Lampung selama ini tidak selamanya benar. Oleh sebab itu, tingginya intensitas pemberitaan tentang *social crime* yang dicurigai melibatkan orang Lampung,

karena kuatnya mempertahankan *piil pesenggiri*, juga perlu pembuktian secara mendalam di lapangan. Hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi *piil pesenggiri* tidaklah senaif seperti yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Filosofi dalam *piil pesenggiri* sebagaimana digambarkan Pranato (2018) dan Wibowo (2018), sebenarnya mengandung nilai-nilai yang memotivasi komunitas Lampung untuk lebih maju, terbuka dan suka bergotong royong, dan sikap selalu menghormati dan toleransi dengan orang luar. Oleh sebab itu, keragaman etnis di wilayah Lampung, bisa dipahami sebagai akibat kandungan nilai-nilai dalam *piil pesenggiri* ini.

Ini menunjukkan bahwa pandangan bahwa menguatnya *piil pesenggiri* orang Lampung sebagai akar penyebab konflik dan kekerasan di wilayah Lampung, tidak selalu benar. Ini misalnya tercermin dalam kehidupan komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan, dimana *piil pesenggiri* yang melekat dalam kehidupan mereka justru menjadi sumber keharmonisan dalam berkehidupan sesama etnis. Hal ini disebabkan karena *piil pesenggiri* dipandang tidaklah berdiri sendiri, tetapi pedoman dasar yang saling terkait dengan nilai-nilai budaya lainnya. Salah satunya adalah keberadaan *angkon muwakhi* yang dianggap sebagai perekat dalam menyatukan persaudaraan antaretnis di lingkungan mereka. Bagi komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan, keberadaan etnis lain ini tidak saja menjadi wilayah mereka menjadi ramai dan beragam, tetapi juga dipandang ikut memperkuat *piil pesenggiri* mereka.

Bagi komunitas Lampung *pepadun* di Way Kanan, penguatan *piil pesenggiri*, salah satunya dilakukan dengan cara menguatkan martabat dan kehormatan dirinya melalui keramaian dan keragaman dalam setiap aktivitas budaya (adat) yang mereka lakukan. Persoalannya keberadaan etnis lain tidak bisa diakui keberadaannya sebelum mereka “menjadi Lampung”. Oleh sebab itu, *angkon muwakhi* telah

menjadi media yang cerdas bagi komunitasnya untuk menarik etnis luar sebagai bagian dari kelompoknya. *Angkon muwakhi* menjadi media untuk mengikat etnis lain agar “menjadi Lampung”, sehingga secara adat bisa dianggap sebagai bagian dari komunitasnya. Upaya menguatkan *piil pesenggiri* pula yang membuat komunitas Lampung ini merasa perlu mempertahankan posisi dan kedudukan seseorang sebagai pemimpin adat (*punyimbang*). Oleh sebab itu, “menjadi Lampung” juga berarti ketika keragaman otoritas yang dilekatkan pada status sosial seseorang, disatukan dalam sebuah status sosial yang sama. Penyamaan status sosial ini hanya akan mendapat legitimasi bisa dilakukan secara adat, dan *angkon muwakhi* menjadi media penting dalam melegitimasi status sosial baru tersebut.

#### DAFTAR SUMBER

- Altugan, A. S. (2015). The Relationship Between Cultural Identity and Learning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 186, 1159-1162. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.161>
- Arifin, Z. (2017). Nagari Ba-Ampek Suku. Politicisation Mythical Origins of Minangkabau, *The Eastern Anthropologist*, 70 (1-2), 177-189.
- Arifin, Z. (2018). *Politik Perkawinan: Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau*. Yogyakarta: Histokultura Garaha Ilmu.
- Aristova, N. (2016). Rethinking Cultural Identities in The Context of Globalization: Linguistic Landscape of Kazan, Russia, as An Emerging Global City. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 236, 153-160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.12.056>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Way Kanan Dalam Angka*. Blambangan Umpu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.
- Chandra, K. (2006). What is Ethnic Identity and Does It Matter? *Annual Review of Political Science*, 9, 397-424. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.062404.170715>
- Chen, Y. (2017). “Cultural Identifications Theory”, dalam Young Yun Kim & Kelly L. McKay-Semmler (Eds), *The International Encyclopedia of Intercultural Communication* (pp.1-9). West Sussex, Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118783665.ieicc0210>
- Creswell, J. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. and Yvonna S. Lincoln (eds). 1994. *Handbooks of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Emberling, G. (1997). Ethnicity in Complex Societies: Archaeological Perspectives. *Journal of Archaeological Research*, 5(4), 295-344. <https://doi.org/10.1007/BF02229256>
- Endrizal & Hendri, N. (2018). Politik Identitas: Konstruksi Sosial dan Relasi Kekuasaan. *Jurnal Islam Realitas*, 4(1), 1-13. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v4i1.463](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i1.463)
- Ganap, V. (2012). Konsep Multikultural dan Etnisitas Pribumi dalam Penelitian Seni. *Jurnal Humaniora*, 24(2), 136-167. <https://doi.org/10.22146/jh.1058>
- Gupta, S. & Bhugra, D. (2009). Cultural Identity and Its Assessment. *Psychiatry*, 8(9), 333-334. <https://doi.org/10.1016/j.mppsy.2009.06.003>
- Hefner, R. W. (2007). *Politik Multikultural*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hidayat, D., Kuswarno, E., Zubair, F. & Hafar, H. (2017). Negosiasi Citra Budaya Masyarakat Multikultural. *Jurnal Aspikom*, 3(2), 157-172.
- Humaedi, M. A. (2014). Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung. *Jurnal Analisa*, 21(2), 149-162.

- <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.11>
- Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis terhadap Multikulturalisme Indonesia. *Jurnal Humanika*, 15(9), 1-8. <https://doi.org/10.14710/humanika.15.9>
- Irianto, S. & Margaretha, R. (2011). *Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung*. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 15(2), 140-150. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i2.1420>
- Kalin, M. & Sambanis, N. (2018). How to Think About Social Identity. *Annual Review of Political Science*, 21, 239-57. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042016-024408>
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Konty, M. (2007). Authority and Conformity, dalam George Ritzer (Ed). *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* (hlm.1-4). West Sussex, Wiley-Blackwell.
- Kurniawan, R. C. (2017). *Piil Pesenggiri: A Concept of Political Power in Lampung Culture*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21 (1), 74-86. <https://doi.org/10.22146/jsp.28702>
- Maher, N. (1994). Minangkabau Migration: Developing an Ethnic Identity in A Multicultural Society. *Australian Geographical Studies*, 32 (1), 58-68. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8470.1994.tb00660.x>
- May, S. (1999). Critical Multiculturalism and Cultural Difference: Avoiding Essentialism. Dalam Stephen May (eds), *Critical Multiculturalism: Rethinking Multicultural and Antiracist Education*. London: UK Falmer Press (hlm.12-45).
- Miller, D. (1995). *On Nationality*. Oxford: Oxford University Press.
- Mustika, I. W. (2011). *Perkembangan Bentuk Pertunjukan Sakura dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Lampung Barat Tahun 1986-2009*. Disertasi Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/53567](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/53567)
- Nurdin, A. F. (2009). Budaya *Muakhi* dan Pembangunan Daerah: Perspektif Filsafat Sosial pada Komunitas Adat Pubian di Lampung. *Jurnal Al-Qalam*, 26(3), 307-322. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i3.1558>
- Parekh, B. (2001). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Permana, R. H. (2019, Juli 18). Riwayat Panjang Konflik Tanah Berdarah di Mesuji. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4629659/riwayat-panjang-konflik-tanah-berdarah-di-mesuji>.
- Pranoto, H. & Wibowo, A. (2018). Identifikasi Nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Piil Pesenggiri dan Perannya dalam Pelayanan Konseling Lintas Budaya. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 3(2), 36-42. <https://doi.org/10.26737/jbki.v3i2.714>
- Renaldy, R. (n.d.). Sejarah Kabupaten Way Kanan Lampung. Diakses dari <https://www.sekitarlampung.com/sejarah-kabupaten-way-kanan-lampung/>
- Setyaningrum, A. (2003). Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 243-260. <https://doi.org/10.22146/jsp.11074>
- Sinaga, R. M. (2012). (Re)produksi Piil Pesenggiri: (Identitas Etnik Lampung dalam Hubungan dengan Pendatang). *Jurnal Antropologi Indonesia*, 33 (2), 98-109. <https://doi.org/10.7454/ai.v33i2.2130>
- Sinaga, R. M. (2014). *Revitalization of Tradition: A Changing Stigma. Study of Culture Piil Pesenggiri in Lampung*. Disertasi Antropologi Universitas Indonesia.
- Siswanto, E., Riyanto, A. & Bestari, P. (2014). The Cultural Preservation of Piil Pesenggiri in Lampung Multicultural

- Society: Citizenship Education Study in Baradatu, Eay Kanan. *Jurnal Civicus*, 18 (2), 140-160. *Jurnal Hukum Internasional*, 11(2), 261-284. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.2.279>
- Spradley, J. P. & McCurdy, D.W. (1987). *Conformity and Conflict. Reading in Cultural Anthropology* (6<sup>th</sup> edition). Boston Toronto: Little, Brown and Company.
- Suparlan, P. (2002a). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 69, 98-105. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448>
- \_\_\_\_\_. (2002b). Multikulturalisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(1), 9-18. <https://doi.org/10.22146/jkn.22069>
- Syaifuddin, A. F. (2006). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Etnovisi*, 2(1), 3-11.
- Thomas, K. K. (2014). Revitalisation of The Performing Arts in The Ancestral Homeland of Lampung People, Sumatra. *Journal of Arts Discourse*, 13, 29-55.
- Utomo, H. K. (2012). Persamaan, Perbedaan dan Feminisme: Studi Kasus Konflik Sampang-Madura. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 16(2), 123-134.
- Wasino. (2013). Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism. *Journal Paramita*, 23(2), 148-155. <https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2665>
- Wibowo, A. (2018). Kajian Unsur Budaya Lampung dan Implikasinya Pada Pelaksanaan Konseling Lintas Budaya. *Journal Fokus Konseling*, 4 (2), 224-230. <https://doi.org/0.26638/jfk.504.2099>
- Yanti, G., Hasyim, A. & Nurmalisa, Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Pengankonan* dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(2), tanpa halaman.
- Yusuf, H. (2016). Nilai-Nilai Islam dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung. *Kalam. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10(1). 167-192. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.340>
- Zulfa, E. A. (2014). Bali-Nuraga Lampung: Identity Conflict Behind The Policy.

